

ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

*Jimmy Albert Pantouw*¹, *Vekie A. Rumaté*², *Een N. Walewangko*³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah Pajak BBN-KB, Pajak KB dan Pajak BBKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara. Analisis yang digunakan ialah model *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara.

Kata Kunci : BBNKB, PKB, BBKB dan PAD

ABSTRACT

Regional taxes as one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) are not well accessed in order to burden the office, both in the form of business and development projects. Can be used because there is no controlled and responsible tax. Therefore, it is only natural that local governments are continuously needed to increase regional income from the regional tax and regional levies sector. The purpose of this study was to see whether the BBN-KB Tax, KB Tax and BBKBilangan Tax on North Sulawesi Province PAD. The analysis is the Ordinary Least Square (OLS) model. The results of the study show that the variable Motor Vehicle Name Transfer (BBNKB) has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. the negative and significant motor vehicle tax (PBBKB) variable on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi. Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in North Sulawesi.

Keywords: BBNKB, PKB, BBKB and PAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran disetiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.(Fernantos : 2015). Daerah otonom diharapkan mampu untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit Bambang Prakosa (2005:2), pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah menurut Kesit (2005:2) “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah adalah pemasukan dari Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2012-2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

Tabel 1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Jenis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2012-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2003	Rp. 125.912.630	Rp. 32.183.900	Rp. 36.264.318	Rp. 18.150.000
2004	Rp. 147.110.034	Rp. 47.364.700	Rp. 45.823.880	Rp. 18.964.636
2005	Rp. 193.245.869	Rp. 68.100.000	Rp. 51.200.000	Rp. 23.150.000
2006	Rp. 218.482.346	Rp. 53.250.000	Rp. 58.063.000	Rp. 43.250.000
2007	Rp. 251.530.645	Rp. 71.186.100	Rp. 73.105.298	Rp. 65.622.262
2008	Rp. 316.534.816	Rp. 101.850.000	Rp. 84.376.775	Rp. 79.060.225
2009	Rp. 331.083.667	Rp. 98.984.000	Rp. 96.416.017	Rp. 81.511.000
2010	Rp. 417.266.346	Rp.133.435.000	Rp. 124.807.976	Rp. 87.988.609
2011	Rp. 535.087.974	Rp. 208.172.499	Rp. 162.199.200	Rp. 96.000.000
2012	Rp. 624.742.585	Rp. 227.462.379	Rp. 176.767.352	Rp. 128.395.104
2013	Rp. 786.631.753	Rp. 283.062.000	Rp. 215.403.496	Rp. 143.240.000
2014	Rp. 939.998.888	Rp. 316.452.739.440	Rp. 243.950.232.588	Rp. 183.336.168.000
2015	Rp. 1.012.945.961	Rp. 322.210.479.540	Rp. 269.028.063.820	Rp. 220.123.486.640
2016	Rp. 981.044.550	Rp. 258.144.600.000	Rp. 255.318.065.000	Rp. 181.123.486.640

Sumber: Sulut Dalam Angka, BPS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu empat belas tahun menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2003 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 125.912.630 juta mengalami peningkatan pada tahun 2007 Rp. 251.530.645 juta. Pendapatan asli daerah meningkat sampai tahun 2015 sebesar Rp. 1.012.945.961 pada tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 981.044.550 juta.

Sedangkan untuk jenis-jenis pajak daerah tingkat provinsi yang terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor empat tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2012 pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 227.462.379 juta dan meningkat ditahun 2013 menjadi Rp. 283.062.00. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 316.452.739.440 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 322.210.479.540 akan tetapi pada tahun 2016 pajak bea balik nama kendaraan bermotor turun menjadi Rp. 258.144.600.000 juta.

Pajak Kendaraan Bermotor dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan tahun 2012 pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 176.767.352 juta dan meningkat pada taahun 2013 menjadi Rp. 215.403.496 juta dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 243.950.232.588 juta. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 269.028.063 dan pada tahun 2016 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjdai Rp. 255.318.065.

Pajak daerah yang diterima oleh provinsi salah satunya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp. 128.395.104 juta mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi Rp. 143.240.000 juta. Pada tahun 2014 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami kenaikan menjadi Rp. 183.336.168 juta meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 220.123.486 juta tapi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 181.123.486 juta.

Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009).
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1).

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus digunakan untuk "*public saving*" dan "*public saving*" ini yang akan digunakan untuk membiayai "*public investment*".

Dari ke-4 (empat) ciri tersebut diatas, ciri ke-2 (dua) merupakan ciri yang paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber (*resources*) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan atau Undang-Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam pemungutan pajak berlaku istilah *no taxation without representation* yang artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada Wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu terdiri dari:

a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar tambah, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan Sumber Data

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional, jurnal-jurnal ilmiah dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Provinsi Sulawesi Utara dengan pengambilan data melalui Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara untuk pengambilan data penelitian. Waktu penelitian adalah 2003-2016.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)
Penelitian melalui beberapa buku bacaan, literatur atau keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam menganalisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
2. *Internet Research*
Penelitian melalui website untuk memperoleh teori dan data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8.0*. adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X ₁	= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
X ₂	= Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
X ₃	= Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
α	= Konstanta/ Intercept
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka dilakukan uji statistik.

Adapun rumusan hipotesis statistik dari persamaan adalah sebagai berikut:

H ₀	: β ₁ < 0
H ₁	: β ₂ > 0
H ₂	: β ₃ ≠ 0 atau β ₃ < 0 atau β ₃ > 0

Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independen, maka pengelolaan data dilakukan dengan metode analisis dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS digunakan untuk memperoleh estimasi parameter dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode OLS dipilih karena merupakan salah satu metode sederhana dengan analisis regresi yang kuat dan populer, dengan asumsi-asumsi tertentu (Gujarati, 2003).

Dalam penelitian ini meliputi pengujian serempak (uji-f), pengujian individu (uji-t) dan pengujian ketepatan perkiraan (R²) dan uji asumsi klasik yang meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Statistik

1. Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t-test statistik)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: $H_1 : \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak dimana tingkat signifikan digunakan yaitu 1%, 5% dan 10%.

2. Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f test statistik)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 1%, 5% dan 10%.

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian determinasi merujuk pada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Nilai R^2 paling besar 1 dan paling kecil 0 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Bila R^2 sama dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukkan kedalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0.

Tidak ada ukuran yang pasti berapa besar R^2 untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat data.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Adanya Multikolinieritas dapat dengan metode VIF (*variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Model regresi yang normal yang memiliki batas angka *tolerance* lebih kecil dari 1, sedangkan batas angka untuk VIF adalah lebih kecil dari 10.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan "pengganggu" pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Jika nR^2 yang merupakan chi-squares (X^2) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares (X^2) pada derajat kepercayaan tertentu (α), kita menolak hipotesis nol H_0 . Hal ini berarti paling tidak ada satu p dalam persamaan secara statistik signifikan tidak sama dengan nol. Ini merupakan ada masalah Autokorelasi dalam model. Sebaliknya jika nilai *chi-squares* hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka kita gagal menolak hipotesis nol. Artinya model tidak mengandung unsur autokorelasi karena semua nilai p sama dengan nol.

Penentuan ada tidaknya autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas chi-squares (X^2). Jika nilai probabilitas lebih besar dari α yang dipilih maka kita gagal menolak H_0 yang berarti tidak

ada autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai a yang dipilih maka kita menolak H_0 yang berarti ada masalah Autokorelasi (Widarjono, 2013).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan: Uji *White*: H_0 = Heteroskedastisitas Jika nilai *chi-square* hitung lebih besar dari nilai X^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika *chi-square* hitung lebih kecil dari nilai X^2 kritis menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Widarjono, 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003- 2016. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

**Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinierita**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). Dalam uji multikolinieritas dengan menggunakan metode VIF. Hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2
Uji Multikolinieritas**

Variabel	Coefficient Variance	VIF
X1	0.429647	628.2210
X2	0.632471	906.1813
X3	0.145845	219.2149

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari perhitungan VIF di atas, nilai yang di dapat lebih lebih besar dari 10 sehingga terdapat masalah multikolinieritas. Walaupun dalam uji multikolinieritas tidak lolos uji multikolinieritas. Akan tetapi, karna persamaan ini tidak untuk diprediksi sehingga masalah multikolinieritas bisa di abaikan (Gujarati, 2002).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji Heteroskedastisitas menggunakan metode *White test*. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan metode *white test* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas**

$R^2 = 0.458548$
Chi-square hitung Obs R-squared = 6.419668
Chi-squares pada α 5 % = 7.81

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 3 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.458548 Nilai Chi-squares hitung sebesar 6.419668 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan R^2). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 3 adalah 7.81. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi menggunakan metode *LM test*. Hasil uji autokorelasi dengan metode *LM test* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.092636$
Chi-square hitung Obs*R-squared = 1.296899
Chi-squares pada $\alpha = 5\% = 5.99$

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 4 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.092636 Nilai Chi-squares hitung sebesar 1.296899 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan R^2). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 2 adalah 5.99. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai Chi-squares tabel maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) X1, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X2 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) X3 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas
C	2.007798	3.063121	0.0120
BBNKB (X1)	2.007798	3.063121	0.0120
PKB (X2)	-2.737352	-3.441997	0.0063
PBBKB (X3)	0.856539	2.242853	0.0488
$R^2 = 0.839263$		F-statistik = 17.40453	

Keterangan ***) signifikan pada $\alpha = 1\%$

**) signifikan pada $\alpha = 5\%$

*) signifikan pada $\alpha = 10\%$

Hasil Olah Eviews 8.0

$$\text{LogY} = 2.007798 + 2.007798x_1 - 2.737352x_2 + 0.856539x_3$$

1. Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji regresi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel BBNKB mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.0120. Nilai ini lebih kecil dari α 1%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel BBNKB mempunyai nilai t_{hitung} yakni 3.063121 dan t_{tabel} 2.681 dengan df 12 ($n-k=16-4$). Jadi, t_{hitung} 3.063121 > t_{tabel} 2.681 artinya ada hubungan linier antara variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (x_1) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y.

Hasil uji regresi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diketahui mempunyai nilai signifikan sebesar 0.0063. Nilai ini lebih kecil dari α 1%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel PKB mempunyai nilai t_{hitung} yakni 3.441997 dan t_{tabel} 2.681 dengan df 12 ($n-k=16-4$). Jadi, t_{hitung} 3.441997 > t_{tabel} 2.681 artinya ada hubungan linier antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor (x_2) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y.

Hasil uji regresi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diketahui mempunyai nilai signifikan sebesar 0.0488. Nilai ini lebih kecil dari α 1%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel PBBKB mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.242853 dan t_{tabel} 2.681 dengan df 12 ($n-k=16-4$). Jadi, t_{hitung} 2.242853 > t_{tabel} 2.681 artinya ada hubungan linier antara variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (x_3) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y.

2. Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.17 dapat dijelaskan pengaruh variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) X_1 , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X_2 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) X_3 secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y. Nilai F-statistik yang diperoleh 17.40453 sedangkan F-tabel 3.49. Nilai F table berdasarkan besarnya α 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/4-1)=3$ dan df untuk denominator $(n-k/16-4)=12$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) X_1 , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X_2 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) X_3 secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

3. Koefisien Determinan (R^2)

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0.83926 = 83.926%. Artinya, bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) X_1 , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X_2 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) X_3 adalah sebesar 83.926% dan sisanya 16.074% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pembahasan

1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian didapat bahwa pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil uji regresi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel BBNKB mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.0120. Nilai ini lebih kecil dari α 1%, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel BBNKB mempunyai nilai t_{hitung} yakni 3.063121 dan t_{tabel} 2.681 dengan df 12 ($n-k=16-4$). Jadi, t_{hitung} 3.063121 > t_{tabel} 2.681 artinya ada hubungan linier antara variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (x_1) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara pajak bea balik nama kendaraan bermotor dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Siahaan (2010:209) mengemukakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi, karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian didapat bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya penurunan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan kenaikan pendapatan asli daerah begitu sebaliknya, *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan definisi Kendaraan Bermotor adalah: “Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak”.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan dilakukan Saepurrahman (2012) yang mendapatkan hasil pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Juga yang dilakukan oleh Wijaya (2016) yang mendapat hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian didapat bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil uji regresi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diketahui mempunyai nilai signifikan sebesar 0.0488. Nilai ini lebih kecil dari α 1%, maka H_0 diterima H_0 ditolak. Variabel PBBKB mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.242853 dan t_{tabel} 2.681 dengan df 12 ($n-k=16-4$). Jadi, t_{hitung} 2.242853 > t_{tabel} 2.681 artinya ada hubungan linier antara variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (x_3) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y . Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara.
2. Hasil penelitian variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara.
3. Hasil penelitian variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara.

Saran

Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel yang lebih luas lagi agar hasilnya semakin baik. Perlu adanya peningkatan pelayanan pemungutan melalui

inovasi baru dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sehingga nantinya diharapkan akan berdampak positif bagi penerimaan pajak daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi maupun terobosan tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2013). "Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya", Ekonosia, Jakarta
- Bambang Prakosa Kesit, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta, UII Press.
- Fernantos, Jefri. 2015. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Setelah dan Sebelum Menjadi Pajak Daerah Tahun (2009-2013) Padang. Universitas Andalas.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonomimetrika Dasar, Erlangga, Jakarta
- Gujarati, Damodar. 2005. Ekonometrika Dasar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008, "Perpajakan" Edisi Revisi, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Thomas, Sumarsan, 2009, "Perpajakan Indonesia", PT. Indeks, Jakarta

